

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI-NELAYAN KECIL (P4K) DI DESA
PULAU LAWAS KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG
KABUPATEN KAMPAR**

OLEH

RUDI HULMIZAN
04115025



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI-NELAYAN KECIL (P4K) DI DESA PULAU LAWAS KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis pelaksanaan kegiatan KPK di Desa Pulau Lawas dalam melaksanakan program P4K, (2) Mengetahui tingkat kemampuan mengembalikan dana oleh KPK di Desa Pulau Lawas dalam pelaksanaan program P4K, dan (3) Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi KPK di Desa Pulau Lawas dalam pelaksanaan program P4K. Penelitian dilaksanakan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*). Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan. Metode Penelitian adalah studi kasus (*case study*), dengan metode pengambilan sampel secara *Sensus*. Analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan KPK dalam Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) di Desa Pulau Lawas bidang sosialisasi, rencana usaha bersama, simpan pinjam, kegiatan sosial dan hubungan dengan pihak lain sudah dilaksanakan oleh KPK di Desa Pulau Lawas sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program P4K. Hanya dibidang pelatihan tidak sesuai pelaksanaannya oleh KPK di Desa Pulau Lawas karena tidak ada satu pun item perencanaan program yang dilakukan. Tingkat kemampuan mengembalikan dana oleh KPK di Desa Pulau Lawas dalam program P4K adalah sangat rendah (33,33%) dan rendah (66,67%) dari total KPK yang ada di Desa Pulau Lawas. Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program P4K diantaranya adalah lambatnya pencairan dana P4K yaitu 4 -7 bulan, peniadaan pelatihan untuk anggota KPK, nilai pinjaman dari bank tidak sesuai dengan pengembangan usaha, biaya untuk mendapatkan surat/izin terlalu tinggi, penguasaan teknologi yang rendah, kesulitan dalam memasarkan hasil usaha, kurangnya partisipasi dan respon PNK dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, sulitnya merubah kebiasaan petani, fasilitas yang terbatas, dan wilayah kerja yang terlalu luas.

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tujuan dari pembangunan pertanian bukan sekedar meningkatkan produksi saja tetapi yang lebih jelas adalah meningkatkan gairah dan kesejahteraan petani. Berbagai keberhasilan di sektor pertanian yang menonjol adalah tercapainya swasembada beras pada tahun 1984 dan semakin mantapnya peningkatan produksi dan produktivitas beberapa komoditas strategis lainnya yang berasal dari komoditas palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Keberhasilan ini telah membawa dampak perbaikan yaitu peningkatan pendapatan menuju terciptanya kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya, terbukanya kesempatan kerja dan peningkatan ekspor nonmigas. Demikian pula dampak lain dari keberhasilan sektor pertanian yaitu adanya perubahan perilaku petani yang mulai berorientasi usahatani dari usaha subsistem ke usahatani modern (Baharsjah, 1997).

Pada tahun 1997 badai krisis menerpa Indonesia yang meluas menjadi krisis ekonomi dan politik yang menyebabkan terjadinya keguncangan dasar perekonomian nasional sehingga mengakibatkan terjadinya ledakan pengangguran. Merosotnya daya beli masyarakat mengakibatkan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan maupun akses kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan. Semua gejala ini akhirnya menyebabkan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan mengalami peningkatan (Sumodiningrat, 1999).

Terjadinya krisis ekonomi juga telah membawa dampak yang krusial terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin dan menurunnya taraf hidup sebagian kelompok masyarakat dibandingkan dari keadaan sebelumnya tanpa terkecuali juga dialami oleh penduduk diberbagai penjuru di Indonesia. Pada saat yang bersamaan juga terjadi perubahan iklim global yang tidak normal dan telah menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan disebagian besar wilayah tanah air dan hal itu tidak saja mengakibatkan penurunan produksi pangan maupun cadangan nasional tetapi telah mengakibatkan kekurangan pangan yang cukup parah diberbagai daerah di Indonesia (Sumodiningrat, 1999).

Kemiskinan pada dasarnya merupakan suatu kenyataan sosial yang menyita banyak waktu dan pemikiran. Dilihat dari waktu, kemiskinan ada seiring dengan keberadaan manusia itu sendiri. Sebagai salah satu masalah kemanusiaan, maka penanggulangannya harus bersifat kemanusiaan pula. Perlu ditekankan pula bahwa miskin tidak terbatas pada yang menganggur saja tapi ditambah pula dengan sekelompok orang yang bekerja dengan tidak ada kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan mobilitas (Rahim, 2001).

Meningkatnya jumlah masyarakat miskin baik di daerah perkotaan maupun dipedesaan merupakan fenomena sosial yang harus diperhatikan secara serius. Berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik pada akhir 2007 jumlah penduduk miskin 37,17 juta jiwa atau 16,58% dari penduduk Indonesia dan 63,52% berada di pedesaan. Sementara jumlah penduduk miskin diprovinsi Riau berjumlah 1.6 juta jiwa dari 4.934.084 jumlah total penduduk provinsi Riau (BPS, 2007).

Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui suatu proses pendidikan yang berkelanjutan dengan prinsip "menolong diri sendiri melalui peningkatan kemampuan". Dengan demikian mereka mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya untuk menjangkau berbagai kemudahan yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat miskin berlandaskan pada peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan sehingga mampu menjangkau fasilitas-fasilitas pembangunan yang tersedia. Cara memberdayakan masyarakat miskin dilaksanakan melalui suatu proses pendidikan yang berkelanjutan mencakup aspek sumberdaya, teknologi, pasar, dan permodalan atau ekonomi kerakyatan (BPTP Riau, 2002).

Berbagai pendekatan sudah diimplementasikan dalam upaya mengembangkan ekonomi rakyat guna untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Berbagai pendekatan tersebut ada yang merupakan skenario pada tingkat nasional, selain itu ada pula yang merupakan kebijakan pada tingkat daerah. Pada sektor pertanian, secara nasional terdapat berbagai program dan proyek yang bersumber dari dana APBN, misalnya pola perkebunan inti rakyat (PIR), tambak inti rakyat, program diversifikasi pangan dan gizi (PDPG) dan pengembangan agribisnis pada pondok

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan KPK dalam Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) di Desa Pulau Lawas dalam hal sosialisasi, rencana usaha bersama, simpan pinjam, kegiatan sosial dan hubungan dengan pihak lain sudah dilaksanakan oleh KPK di Desa Pulau Lawas sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program P4K. Dibidang penumbuhan kelompok sudah cukup sesuai (75% dari keseluruhan item) dilaksanakan oleh KPK di Desa Pulau Lawas sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program dan dibidang pelatihan tidak sesuai dilaksanakan oleh KPK di Desa Pulau Lawas sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program karena tidak ada satu pun item perencanaan program yang dilakukan.
2. Tingkat kemampuan mengembalikan dana oleh KPK di Desa Pulau Lawas dalam program P4K adalah sangat rendah (33,33%) dan rendah (66,67%) dari total KPK yang ada di Desa Pulau Lawas.
3. Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program P4K cukup banyak diantaranya :
 - a. Lambatnya pencairan dana P4K yaitu 4 -7 bulan dan berdampak pada usaha anggota KPK sehingga anggota KPK menjadi lama untuk swadaya dan mandiri dan peniadaan pelatihan untuk anggota KPK.
 - b. Banyaknya anggota KPK yang sulit untuk mengikuti kegiatan penyuluhan karena sibuk mengurus pekerjaannya masing-masing.
 - c. Nilai pinjaman dari bank tidak sesuai dengan pengembangan usaha, biaya untuk mendapatkan surat/izin terlalu tinggi, penguasaan teknologi yang rendah dan kesulitan dalam memasarkan hasil usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazak. 1995. *Modal Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Badan Diklat Pertanian. Jakarta.
- Asfui, Ferdhinal. 2007. *Laporan Pemantauan Program Kredit Mikro Nagari*. Solok.
- Asnawi, syofjan. 1999. *Perkembangan Pemikiran : Pembangunan Wilayah Pedesaan*. Padang.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Program Penyuluh Pertanian*. Pekanbaru.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian. 2000. *Rangkaian Petunjuk Teknis Lapangan*. Jakarta.
- Baharsjah, S. 1997. *Pembangunan Pertanian Modern Yang Berbudaya Industri Dengan Membangun Industri Pertanian yang Berbasis Pedesaan*. Makalah Seminar Nasional di Pekanbaru 1997. Deptan RI. Jakarta.
- Balai Informasi Penyuluhan. 2006. *Laporan Buku Tahunan 2006*. Kecamatan Bangkinang Seberang.
- Balai Informasi Penyuluhan. 2007. *Programa Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2007*. Kecamatan Bangkinang Seberang.
- Balai Pelatihan Tanaman Pangan. 2004. *Temu Tugas Bagi Petugas P4K*. Riau.
- Balai Pelatihan Tanaman Pangan. 2002. *Penilaian/Pemantauan Kemandirian KPK*. Riau.
- Bappenas. 1993. *Pnduan Inpres Desa Tertinggal*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Darwanto. Harry. 2003. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasiskan Masyarakat Terpencil. <http://www.bappenas.go.id>. [2 Maret 2008].
- Departemen Pertanian. 1994. *P4K Suatu Proyek Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Keluarga Petani Nelayan Kecil*. Jakarta.
- Departemen Pertanian. *Pedoman Umum Proyek Ketahanan Pangan*. TA. 2001. Jakarta.